



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

EVALUASI PROGRAM BELANJA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) TAHUN 2021



: @Puskajianggaran



: @Puskajianggaran



: www.puskajianggaran.dpr.go.id

Penulis : THF



Realisasi PEN

Per Tanggal 12 November 2021

- **Realisasi klaster kesehatan baru mencapai 60,1 persen atau Rp129,30 triliun dari pagu anggaran Rp214,96 triliun. Realisasi ini utamanya digunakan untuk diagnostik testing dan tracing sebesar Rp3,09 triliun atau 68,7 persen, biaya klaim perawatan pasien termasuk insentif nakes sebesar 76,4 persen atau Rp14,47 triliun, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi baru sebesar 46,1 persen atau Rp26,6 triliun**
- **Realisasi klaster program perlindungan sosial sudah mencapai 74,4 persen atau Rp139,04 triliun dari pagu anggaran Rp186,64 triliun, Realisasi tersebut tersebar di beberapa program dengan rincian: (i) PKH sebesar 94,3 persen atau Rp26,69 triliun dari pagu Rp28,31 triliun; (ii) Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,86 triliun; (iii) BLT Desa sebesar 65,5 persen atau Rp18,85 triliun; (iv) Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 76,1 persen atau Rp6,70 triliun; dan (v) Kartu Prakerja sebesar Rp11,6 triliun**
- **Realisasi klaster prioritas sebesar 63,31 persen atau Rp74,39 triliun dari pagu anggaran Rp117,94 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk program padat karya kementerian/lembaga, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah**





Realisasi PEN

- **Klaster dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai 48,5 persen atau Rp78,73 triliun dari pagu anggaran Rp162,40 triliun. Realisasi ini terendah diantara kluster lainnya. Anggaran pada kluster ini digunakan untuk menyalurkan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP, Penempatan Dana Bank, subsidi bunga KUR, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan PKL**
- **Klaster insentif usaha mencapai 99,4 persen atau Rp62,47 triliun dari pagu Rp anggaran Rp62,83 triliun. Realisasi ini merupakan yang tertinggi, dan anggarannya dipergunakan untuk membiayai insentif perpajakan seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM, pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan BM DTP**



Evaluasi

- Pada kluster kesehatan terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan rendahnya realisasi anggaran, khususnya di luar pulau Jawa. Hingga saat ini tingkat vaksinasi di luar pulau Jawa masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan di pulau Jawa. Tidak hanya itu saja, pelaksanaan kluster kesehatan di luar pulau Jawa juga masih ditemukan terkendala dengan masalah terkait administratif, klaim, hingga distribusi atau pencairan yang mengakibatkan para nakes terlambat menerima insentif
- Pelaksanaan pada kluster program perlindungan sosial ini masih dihadapkan pada kendala pendataan dan pencairan penerima program Kartu Sembako, BLT Desa, dan Bantuan Subsidi Upah di berbagai daerah. Hasil kunjungan Kementerian Sosial ke beberapa daerah menemukan bahwa terdapat penerima BLT Desa dan Kartu Sembako yang didata menerima dua kali, penerima yang didata namun penerimanya tidak ada, penerima yang tidak tetat sasaran, serta lambatnya proses pendataan dan pencairan. Bahkan hasil verifikasi berkala yang dilakukan Kementerian Sosial baru-baru ini menemukan terdapat lebih dari 28 ribu penerima bansos merupakan PNS aktif (Narasi.tv, 2021)
- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto, mengatakan realisasi program dukungan UMKM dan korporasi yang masih minim dikarenakan terkendala dengan reimbursement dan juga regulasinya. Sementara kegiatan KUR sudah dilaksanakan dan dalam proses, dan dalam kluster ini Penyertaan Modal Negara untuk 6 BUMN masih terkendala karena harus menunggu regulasinya atau peraturan pemerintah (PP) diterbitkan. Selanjutnya untuk program bantuan PKL masih terkendala dengan pendataan di lapangan, keterlambatan ini dikarenakan program bantuan PKL baru ditambahkan ketika gelombang kedua Covid 19 melanda Indonesia





Proyeksi Realisasi PEN 2021: Nilai Nominal Naik, Namun Realisasinya Lebih Rendah Dibanding 2020

Pada Tahun 2020 pemerintah hanya merealisasikan 83,4 persen atau Rp579,78 triliun dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun. Total pagu anggaran pada tahun 2021 meningkat namun realisasinya kemungkinan menurun, secara perhitungan berdasarkan data terakhir rata rata realisasi anggaran PEN setiap bulannya berkisar Rp45,6 triliun atau sekitar 6,12 persen dari pagu. Realisasi anggaran PEN per 12 November naik 3 sampai 4 persen dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya yakni 5 November sebesar 61,3 persen. Kenaikan 3 sampai 4 persen dalam dua pekan berada dikenakan yang hampir sama dengan rata-rata laju realisasi anggaran setiap bulannya. Dengan laju realisasi tersebut, kemungkinan terdapat tambahan realisasi belanja PEN sebesar 12,24 persen dalam dua bulan tersisa tahun ini, sehingga prediksi realisasi anggaran PEN pada akhir tahun hanya mencapai kisaran 73,5 persen. Bahkan data terbaru per 19 November realisasi anggaran PEN baru sebesar 66,6 persen, yang artinya hanya naik 1,6 persen dari 1 minggu sebelumnya. Secara keseluruhan permasalahan yang terjadi dikarenakan koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan anggaran PEN tahun ini, pemerintah juga tidak memprediksi kenaikan kasus yang signifikan terjadi di Indonesia pada bulan Mei hingga Agustus yang mengakibatkan menurunnya perekonomian karena pemberlakuan PPKM.





Rekomendasi

- Pemerintah harus lebih fokus untuk mengawasi dan mengawal program PEN di daerah daerah dengan membenahi sistem birokrasi dan administrasi yang lebih mudah
- Memperbaiki seluruh sistem pendataan terkait penerima pada klaster program perlindungan sosial dan klaster dukungan UMKM dan korporasi.
- Dalam anggaran PEN tahun 2022 diharapkan pemerintah untuk lebih siap ketika mengalami kejadian yang tidak diperhitungkan seperti kenaikan kasus yang signifikan

